

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini ditandai dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Seiring perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia, maka kebutuhan akuntabilitas sebagai wujud pertanggung jawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerja kepada publik. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah sendiri sehingga pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan transparan. Media pertanggungjawaban dalam bentuk laporan pertanggungjawaban selama 1 tahun anggaran yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Berbagai pihak mengandalkan informasi keuangan yang disajikan dan dipublikasikan oleh pemerintah daerah dengan kegunaan berbeda-beda. Sehingga laporan yang disajikan tersebut harus berkualitas. Laporan keuangan dikatakan berkualitas jika laporan keuangan yang disajikan tersebut memenuhi syarat yaitu

diakuntansikan dengan benar, dilaporkan secara lengkap, diaudit secara independen.

Dewasa ini tuntutan masyarakat semakin meningkat atas pemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*), pemerintah daerah harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat diwujudkan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip. Laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas. Laporan keuangan adalah suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Salah satu faktor utama yang dapat meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan adalah pengawasan intern. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan.

Ponamon (2014) mengemukakan pengaruh Pengawasan Internal memiliki pengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Hal ini berarti bahwa kegiatan pengawasan internal telah dilakukan sehingga Pemerintah menjamin bahwa semua pencatatan akuntansi dan keuangan pemerintah telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, sehingga tujuan untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas dapat tercapai. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Syarifudin (2014) mengemukakan peran auditor internal atau bisa dikatakan peran pengawasan internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah artinya meningkatnya peran pengawasan keuangan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pemahaman tentang peraturan. Peraturan yang dimaksud adalah pedoman yang harus dilakukan serta prosedur terkait dengan serangkaian strategi untuk mencapai tujuan dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP yang berbasis akrual. Penerapan akuntansi berbasis akrual diperlukan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta untuk memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel. Perubahan peraturannya tentang akuntansi pemerintah dari basis kas ke basis akrual cukup kompleks sehingga diperlukan pemahaman yang utuh mengenai konsep akuntansi.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ponamon (2014) mengemukakan bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan berpengaruh

terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hal ini berarti bahwa pegawai bagian akuntansi/keuangan telah memahami proses akuntansi sampai menjadi laporan keuangan sehingga tujuan untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas dapat tercapai. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sintike, dkk (2017) mengemukakan bahwa pemahaman tentang Peraturan berpengaruh negatif dan tidak signifikan secara statistik terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Hal ini disebabkan karena terjadi perubahan peraturan dalam waktu yang sangat singkat sehingga menyulitkan pejabat pengelola keuangan dalam memahami peraturan yang menjadi acuan di dalam penyusunan laporan.

Permasalahan pemahaman peraturan terhadap sistem akuntansi pemerintah yang digunakan saat ini Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tidak terlepas adanya peran dari sumber daya manusia. Untuk mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting. Penempatan sumber daya manusia yang tidak sesuai antara latar belakang pendidikan dengan tugas pokok dan fungsi yang dikerjakan. Akibat dari keterbatasan sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan akuntansi, tanggungjawab dari para pengelola keuangan menjadi lebih berat untuk membuat laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Menurut Wardani, dkk (2017) pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dibidang akuntansi akan banyak menemui hambatan yang mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sintike, dkk (2017) mengemukakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hal ini disebabkan adanya pembinaan yang dilakukan berupa pendidikan, pelatihan, penataran dan sejenisnya khususnya bidang keuangan dalam pengarahannya untuk penyusunan informasi laporan keuangan. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Teguh Erawati dkk (2018) mengemukakan adanya kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, masih sulitnya mengubah cara pikir (*mindset*) dan cara kerja aparatur, masih rendahnya disiplin dan etika pegawai, sistem karier yang belum sepenuhnya berdasarkan prestasi kerja, sistem remunerasi yang belum memadai untuk hidup layak, rekrutmen yang belum dilakukan berdasarkan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan.

Hal ini yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan adalah penggunaan teknologi informasi. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Haza (2008) terdapat pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan hubungannya positif. Pengaruh antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah semakin besar pemanfaatan teknologi informasi maka nilai kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik pula. Berbeda

dengan penelitian yang dilakukan oleh Sintike, dkk (2017) penggunaan teknologi informasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan secara statistik terhadap kualitas informasi laporan keuangan, hal ini disebabkan belum semua pegawai yang bekerja di bagian akuntansi keuangan pada SKPD mampu mengoperasikan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SIMDA).

Hal lain yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan daerah adalah adanya komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah suatu unit terkoordinasi yang terdiri dari dua orang atau lebih dan berfungsi mencapai suatu sasaran atau tujuan tertentu. Menurut Haspari (2011) Komitmen organisasi merupakan nilai personal, yang kadang-kadang mengacu pada sikap loyal pada perusahaan/organisasi atau komitmen pada perusahaan itu. Berdasarkan penelitian Manimpurung, dkk (2018) komitmen organisasi berpengaruh secara parsial kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal ini ditunjukkan nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel ($0.2940 > 2.000$) dan nilai signifikansi yang lebih kecil daripada nilai signifikansi 5% ($0.005 < 0.005$). Pegawai yang memiliki komitmen tinggi terhadap organisasinya akan berusaha meningkatkan kinerjanya serta menunjukkan dedikasi dan dukungan yang kuat dalam pencapaian tujuan organisasi dengan memaksimalkan kemampuan yang dimilikinya. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Siwambudi, dkk (2017) interaksi komitmen organisasi dengan kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan interaksi komitmen organisasi dengan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dari penjelasan dan pemaparan diatas, maka terdapat perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya, sehingga ini layak untuk diteliti kembali. Penelitian merupakan pengembangan dari peneliti Ranny Hanafi (2017) dengan menggunakan variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah (SAP), pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, peran internal audit serta kapasitas sumber daya manusia. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan variabel pengawasan internal, pemahaman peraturan, kapasitas SDM, penggunaan teknologi informasi, komitmen organisasi. Namun penelitian ini sama dengan yang dilakukan Sintike, dkk (2017) dengan variabel yang sama namun yang membedakan adanya pemahaman peraturan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Taulud dengan peraturan Pemerintah Kabupaten Demak yang digunakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengambil judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang, maka rumusan masalah adalah:

1. Apakah ada pengaruh pengawasan internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak ?
2. Apakah ada pengaruh pemahaman peraturan terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak?

3. Apakah ada pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak?
4. Apakah ada pengaruh penggunaan Teknologi Informasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak?
5. Apakah ada pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh pengawasan internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.
2. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman peraturan terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.
3. Untuk menganalisis pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.
4. Untuk menganalisis pengaruh penggunaan Teknologi Informasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.

5. Untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Aspek Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan dalam bidang akuntansi, khususnya akuntansi sektor publik sebagai informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya.

2. Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan bahan kajian untuk peneliti-peneliti selanjutnya di bidang akuntansi sektor publik dan lebih khusus terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Aspek Praktis

Penelitian ini sebagai bahan masukan bagi SKPD yang terkait sehingga dapat menjadi tolak ukur dalam menilai kinerja aparatur pemerintahan dan perangkat-perangkat organisasi yang terkait di dalamnya untuk mewujudkan *good governance* yang mana salah satu indikatornya tercermin melalui kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.